

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arief, Bardah Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____. 2008. *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Mandar Madju, Bandung.
- 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Karton, Kartini, 1996, *ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2013, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia. Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer*, buku II, Mahkamah Agung RI edisi 2007, Jakarta.

- 2008, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Haka Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan ELSAM, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi, H.Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991
- R. Soesilo, M. Karjadi, 1983, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan dan Komentarnya*. Politeia, Bogor.
- 1988. *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Salam. Faisal, 2006. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Serikat Putra Jaya. Nyoman, 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjarief, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Sianturi. SR, S.H, 1989. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Penjelasannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- 1996, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
- Soegiri Dkk, 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Republik Indonesia*, Cetakan pertama, CV Indra Jaya, Jakarta.
- Subroto Djoko, 1997, *Visi ABRI Mantap Masa Depan*, Gajah Mada University Press, Magelang.
- Soekanto, Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant, 2012, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Pendidikan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Majalah

- Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010 *Advokasi*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713 .

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Hukum Disiplin Militer*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor VI/2000 tentang *Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor VII/2000 tentang *Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Administrasi Prajurit*.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tentang *Petunjuk Administrasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/14/VII/2007 tentang *Atasan Yang berhak Menghukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia*.

D. Lain-lain

Internet, [http : / www.tni.mil.go.id/ sejarah tni](http://www.tni.mil.go.id/sejarah_tni), diakses hari Rabu tanggal 5 Februari 2015.

Internet, [http :/ www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), *Kebijakan dan Analisis Kebijakan*, diakses hari Senin tanggal 9 Februari 2015.

Harian Kompas Nomor 192 ke 50, terbit hari Rabu tanggal 14 Januari 2015.

